

341.69

818

h c

10 6

**HUBUNGAN ANTARA KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN, KEJAHATAN GENOCIDE DAN KEJAHATAN
PERANG**

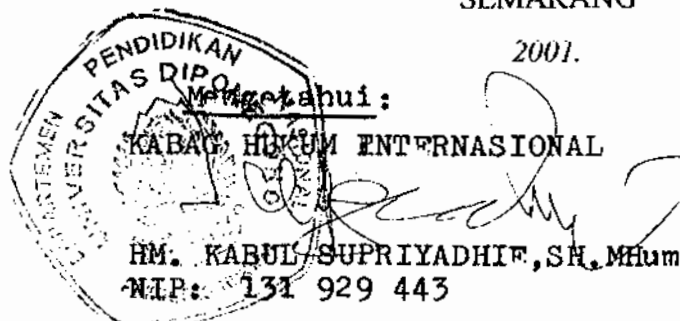
fr

**DISUSUN OLEH :
DADANG SISWANTO, SH**

Makalah disusun dalam rangka sebagai bahan diskusi pada bagian Hukum
Internasional, tanggal 2 Juni 2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2001.



HUBUNGAN ANTARA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, KEJAHATAN GENOCIDE DAN KEJAHATAN PERANG

OLEH DADANG SISWANTO

1 Pendahuluan :

Kejahatan Hak asasi manusia atau pada dasarnya dapat terjadi baik dalam situasi damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Pada masa situasi konflik bersenjata itu sendiri dapat dibedakan dalam konflik bersenjata internasional maupun dalam situasi konflik bersenjata non internasional (perang saudara). Prinsip dasar dari kejahatan hak asasi manusia ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks kekuasaan pemerintah atau difasilitasi oleh pemerintah.

Adapun kejahatan-kejahatan terhadap hak asasi manusia tersebut meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan genocide (genocide) dan kejahatan perang (war crimes). Ketiga jenis kejahatan tersebut dapat dibedakan namun kadangkala tidak dapat dipisahkan. Perbedaan antara ketiga jenis kejahatan tersebut, dikarenakan masing-masing kejahatannya diatur dalam berbagai konvensi internasional yang berbeda. Namun dalam prakteknya bentuk-bentuk kejahatan internasional tersebut dapat juga dilakukan secara bersamaan, atau sebagai delik idialisme. Sebagai contoh suatu perbuatan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang dilakukan pada masa konflik bersenjata, maka si pelaku dapat dituntut karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang maupun melakukan

genocide (pembunuhan massal). Pembunuhan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang, karena dilakukan atau ditujukan pada penduduk sipil pada masa konflik bersenjata, sedangkan pembunuhan tersebut dapat dituntut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai bagian kebijakan penguasa atau pemerintah. Adapun pembunuhan tersebut dapat dianggap sebagai genocide apabila niat si pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut dilandasi dengan motif ingin memusnahkan sebagai kelompok berdasarkan agama, ras maupun keturunan.

II. PERMASALAHAN :

Berkaitan dengan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan makalah dalam diskusi bagian Hukum Internasional ini adalah :

1. Bagaiamanakah hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAK ASASI MANUSIA ?
2. Bagaiamanakah Hubungan antara kejahatan perang dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genocide ?

III. PEMBAHASAN :

1. Hubungan kejahatan Genocide dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan Kejahatan Perang

Undang-undang no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan ketentuan nasional yang dimaksudkan untuk mengadili “pelanggaran-HAM yang berat”. “Pelanggaran HAM yang berat”, menurut Pasal 7 UU no 26 tahun 2000 meliputi kejahatan *genocide* dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Kejahatan *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan *extra ordinary crimes*.

Delik *extra ordinary crimes* tidak sama dengan delik-delik KUHP. sebagaimana disebutkan di *Penjelasan Umum alinea 9* UU no 26 tahun 2000 yang berbunyi sbb :

Pembentukan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “ *extra ordinary crimes* dan berdampak luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Berdasarkan Penjelasan umum alinea 9 di atas, dinyatakan “pelanggaran HAM yang berat” merupakan *extra ordinary crimes*, yang berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional dan pelanggaran HAM berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. (*ordinary crimes*). Sesuai penjelasan tersebut, delik-delik KUHP tidak dapat digunakan untuk mengadili kejahatan *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genocide diatur dalam Pasal 8 Undang-undang no 26 tahun 2000 dirumuskan sebagai berikut :

Kejahatan genocide sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok ;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok ; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan , diatur Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya, bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan yang lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa atau;
- j. kejahatan apartheid.

Rumusan delik kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU no 26 tahun 2000 adalah identik dengan *Statute International Criminal Court (ICC) 1998*.

Selanjutnya di samping mempunyai kesamaan sebagai *delik extra ordinary crimes*, hubungan antara kejahatan genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan perang adalah sebagai berikut :

Kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat dilakukan dalam sengketa bersenjata (internasional atau internal) dan masa damai. Kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diatur dalam Protokol Tambahan I-1977, meskipun kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diadili secara bersamaan dengan kejahatan perang.¹

Unsur esensial dari kejahatan genocide yaitu; adanya niat untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan melakukan kejahatan yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 8 UU no 26 tahun 2000. Dalam Konvensi Genocide 1948, Statute Roma 1998 maupun dalam Pasal 8 UU no 26 tahun 2000, tidak dibedakan mengenai apa yang dimaksud dengan; “kelompok : “bangsa”, etnik, “rasial maupun agama”.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam *International Criminal Tribunal for the Rwanda*, yang berkaitan dengan kasus *Akayesu* telah dibedakan pemakaian istilah-istilah tersebut yaitu :

A national group is defined as a collection of people who are perceived to - share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of right and duties.

An ethnic group is generally defines as a group whose members share a common language or culture.

¹ Lihat Statute ICTY 1993 dan Statute ICTR 1994

A racial group is based on the hereditary physical traits often identified geographical region, irrespective of linguistic, cultural, national, or religious factors.

The religious group is one whose members share the same religion, denomination or mode of worship.²

Dikaitkan dengan kejahatan perang, kadangkala hakim akan kesulitan untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai kejahatan genocide, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebab suatu kejahatan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis kejahatan tersebut, sebagai contoh kasus **Dusko Sikirica** yang diadili oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, tanggal 13 Nopember 2000. **Dusko Sikirica** didakwa melakukan penyiksaan dan perkosaan, serta pembunuhan terhadap muslim Bosnia dan penduduk sipil Croatia di kamp tawanan Karaterm, tanggal 24 Mei sampai dengan 5 Agustus 1993. Atas perbuatan tersebut *Dusko Sikirica sebagai komandan kamp tawanan*, dituduh melakukan:

- (1) kejahatan genocide yaitu melakukan pembunuhan dan perkosaan terhadap Kaum muslim Bosnia dan penduduk sipil Croatia berdasarkan agama;
- (2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan yaitu melakukan pembunuhan dan perkosaan penduduk sipil dan;
- (3) pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949 berupa pembunuhan dan perkosaan dalam konflik bersenjata Internasional.

Dari ketiga jenis kejahatan yang didakwakan, ternyata hanya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terbukti dilakukannya. Adapun dakwaan melakukan kejahatan genocide berupa pembunuhan muslim bosnia dan penduduk

² lihat pula Article III C: Genocide Convention 1948 dan putusan pengadilan internasional Rwanda.

Croasia tidak terbukti sebagai kejahatan genocide, karena terdakwa tidak terbukti berniat untuk memusnahkan golongan penduduk berdasarkan agama dan etnik.³

Berkaitan dengan contoh kasus di atas, dapat didefinisikan kejahatan genocide merupakan perluasan dari kejahatan perang, dalam arti kejahatan perang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan genocide, apabila kejahatan perang yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik kejahatan genocide. Di samping itu kejahatan genocide dapat dibedakan dengan kejahatan perang, apabila kejahatan perang yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnik dan agama.

2. Hubungan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dengan Kejahatan Perang

Sama halnya dengan kejahatan genocide tersebut di atas, kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan perluasan dari kejahatan perang, apabila kejahatan perang yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu ; kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung pada penduduk sipil, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No 26/2000. Menurut Penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000, yang dimaksud dengan “penyerangan yang ditujukan langsung pada penduduk sipil”, adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau akibat kebijakan yang berhubungan dengan

³ A. Sikirica et al-Sentencing Judgment fil....Microsoft Internet explorer.

organisasi". Jadi unsur esensial dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adanya pengetahuan dari pelaku bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan penguasa atau organisasi. Selanjutnya kejahatan perang dapat dibedakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila kejahatan perang yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur delik kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tidak berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran berat dalam konflik bersenjata internasional di atas, kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perluasan kejahatan perang selama konflik bersenjata non internasional, apabila kejahatan perang memenuhi unsur-unsur delik kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang dapat berbeda dengan kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila delik-delik kejahatan perang yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur delik kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di samping itu dapat dikemukakan bahwa kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perluasan kejahatan perang, karena kedua kejahatan tersebut dapat dijadikan target dari kejahatan perang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genocide mempunyai sifat lebih luas dari kejahatan perang, karena kedua kejahatan tersebut dapat dilakukan baik dalam masa damai maupun dalam masa sengketa bersenjata.

IV KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di muka, maka kesimpulan yang diajukan dalam makalah ini adalah : . Hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan , kejahatan genocide dan kejahatan perang, merupakan kejahatan-kejahatan internasional yang dapat diadili secara nasional maupun internasional. Mengingat kejahatan-kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai delik *extra ordinary crimes* yang berbeda dengan *delik ordinary crimes*.

Di samping itu dapat pula dikemukakan bahwa pengertian kejahatan perang lebih sempit dibandingkan dengan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genocide yang dapat terjadi tidak hanya pada masa damai, namun dapat pula terjadi pada masa sengketa bersenjata.

DAFTAR BACAAN :

Haryomataram, GPH, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, UNS Press 1984

Kalshoven Fritz, Constraint on the Waging of War, ICRC second Edition, May 1991

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bag 1 Binacipta Bandung 1984

Muladi, Prinsip-Prinsip Fundamental Peradilan Pidana Internasional, Makalah dalam Seminar Nasional HAK ASASI MANUSIA di FH Unissula Semarang, 2000

Peraturan-peraturan :

Statute International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993

Statute International Criminal Tribunal for Rwanda 1994

UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

UPT-PUSTAK-UNDIP